



EFEKTIFKAN KOALISI
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, saat keluar ruangan, usai bertemu di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (25/11). Pertemuan kedua pimpinan partai ini untuk mengefektifkan koalisi yang mereka bangun.

LSM Galang Petisi Independensi KPU

KPU tidak akan netral kalau anggota parpol bisa masuk.

JAKARTA — Sebelas lembaga yang fokus terhadap masalah pemilu menolak masuknya anggota partai ke dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka sedang menggalang dukungan untuk mengeluarkan petisi penolakan draf revisi UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Sebelas lembaga tersebut di antaranya, KRHN, Cetro, IPC, SPD, JPRR, SSS, Perudem, Puskappol UI, TePI, dan Sigma Indonesia. "Komisi II DPR RI telah merampok independensi penyelenggara pemilu," kata peneliti KRHN, Very Junaidi, Kamis (25/11), saat menyikapi kesepakatan Komisi II DPR yang menyetujui anggota parpol boleh maju sebagai calon anggota KPU jika telah mengundurkan diri sebagai anggota parpol sehari sebelum mendaftar.

Jika keputusan ini diumumkan, Verry menganggap, KPU nantinya akan menjadi tidak netral dan cenderung menguntungkan partai tertentu. Sekalipun calon partai sudah mengundurkan diri, keterkaitan dengan partai tidak akan bisa dilepaskan. "Pengalaman buruk Pemilu 1999 sangat mungkin terjadi," kata Verry.

Lalu, dari sisi pengawasan, dengan adanya orang

Persoalan yang muncul jika parpol masuk KPU

- Menghambat kinerja penyelenggara pemilu
 - Pada tahapan aturan, mereka akan memperjuangkan aturan yang lebih menguntungkan partainya.
 - Pada penetapan daftar pemilih, mereka cenderung menggeser orang-orang yang pro dan kontra dengan partainya.
- Pada proses pengesahan hasil pemilu, bisa terhambat jika ada yang tidak mau memberikan tanda tangan.
- Saat verifikasi parpol peserta pemilu, bisa muncul konflik kepentingan.

Sumber: keterangan Cetro

yang sudah pernah menjadi anggota parpol, kinerja Bawaslu akan menjadi lemah. Sebab, orang-orang tersebut akan cenderung mengamankan serta melejitkan kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh parpol. "Sistem penyelenggaraan pemilu yang baik tidak akan berjalan karena adanya kepentingan di dalamnya," ujar Verry.

Direktur Eksekutif Cetro, Hadar Gumay, mengaku kecewa dan prihatin atas keputusan Komisi II itu. "Penolakan ini sebenarnya besar, tapi DPR kita sepertinya tidak peduli karena telah ditutupi oleh keinginan yang besar untuk ikut campur sebagai penyelenggara."

Sebagai langkah lanjutan dari penolakan ini, sebelas organisasi itu saat ini sedang menggalang petisi penolakan. Saat ini, menurut Hadar, sudah lebih dari 1.000 tanda tangan yang telah dikumpulkan.

Jika petisi ini tidak bisa menghasilkan perubahan, sebelas lembaga itu akan mendesak pemerintah untuk menolak draf revisi UU Penyelenggara Pemilu. "Jika

pemerintah tidak bisa mengeblok mereka, kami akan melakukan *judicial review*."

Belum menyerah
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat (PD) yang *walk out* saat *voting* pengambilan keputusan atas draf revisi UU No 22/2007 masih belum menyerah. Mereka akan tetap memperjuangkan agar anggota parpol yang masuk KPU sudah harus mengundurkan diri lima tahun sebelumnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, pembahasan revisi UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu belum selesai. "Baru proses pembahasan awal di Komisi II, *toh*," kata Anas.

Diungkapkannya, masih akan ada pembahasan lanjutan revisi UU No 22/2007 di panitia khusus (pansus) bersama dengan pemerintah. Dalam pembahasan mendatang, Demokrat akan mengupayakan lagi keinginannya agar KPU tetap berdiri sebagai lembaga mandiri dan independen. ■ andri saubani/rosyid nurul hakim/indra rezki-sari, ed: joko sadewo

SBY Minta Ditegakkan Sanksi ke PJTKI Lalai

Ikhwan Shiddieqy

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tidak lalai dalam menjalankan tugasnya. Presiden menyampaikan hal itu menyusul insiden penganiayaan dua orang tenaga kerja Indonesia (TKI) di Timur Tengah.

"Saya ingin memastikan semua perusahaan pengirim tenaga kerja tidak lalai," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (25/11). Presiden menegaskan, dia bersama Wapres Boediono akan melakukan sidang pada

perusahaan-perusahaan itu.

Jika ada kesalahan pada perusahaan pengirim tenaga kerja itu, kata Presiden, maka dampaknya bisa panjang dan besar. "Kalau harus memberikan sanksi kita berikan sanksi. Ini soal manusia, tidak boleh ada kelalaian apa pun," kata Presiden.

Terkait masukan membuat undang-undang khusus tenaga kerja wanita (TKW), Presiden menilai itu usul yang baik. "Bila Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada kandungannya kecil, tidak lagi bisa merespons apa yang ada sekarang ini, kita bisa lakukan revisi atau bisa saja diperlukan undang-undang khusus ten-

gah itu," katanya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, moratorium TKI ke Arab Saudi menjadi opsi yang dimiliki pemerintah. "Kalau *toh* nanti melaksanakan moratorium harus benar-benar dengan persiapan yang total," kata Muhaimin.

Semua masalah di lapangan, kata dia, harus diselesaikan secara simultan. Salah satu penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengetatan dalam pengiriman TKI ke Arab Saudi.

Dalam melaksanakan langkah itu, Muhaimin

mengaku sudah memberi instruksi langsung kepada Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Selain penge-tatan, lanjut Muhaimin, sistem juga harus dibenahi.

Selain TKW, ujar Muhaimin, pengiriman TKI jalan terus. Termasuk tenaga kerja formal. Sementara Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar meminta agar semua pihak tidak memolitisasi TKI untuk kepentingan tertentu. "Kami mengutuk pihak-pihak yang mengeksploitasi buruh untuk kepentingan mencari popularitas," ungkap Marwan. ■ ed: joko sadewo

Pendirian Partai Diperketat

Indira Rezkisari

JAKARTA — Pemerintah mengusulkan syarat yang lebih ketat bagi pendirian partai politik dalam revisi UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Selain mengajukan usul perubahan pada pasal jumlah pendiri partai, pemerintah meminta pula partai memperbesar saldo tabungannya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, kemarin, pihak pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Gamawan mengusulkan perubahan dari jumlah pendiri partai politik yang 1.000 orang menjadi 625 orang. Perketatan kemudian diajukan lewat syarat kalau partai bisa berdiri dengan minimal 25 orang warga negara di setiap provinsi.

Jumlah 625 orang diambil Gamawan dari 25 orang dikali 25 provinsi atau 75 persen dari total 33 provinsi di Tanah Air. Sebelumnya,

dalam UU No 2 Tahun 2008, dikatakan dalam pasal 2 ayat 1 partai politik didirikan dan dibentuk dengan akta notaris oleh paling sedikit 1.000 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dan tersebar di paling sedikit 75 persen jumlah provinsi.

"Tersebar supaya mewakili Indonesia," kata Gamawan. Ditambahkannya, syarat yang diusulkan pemerintah lebih berat dari usulan perubahan DPR. Angka 75 persen dari 33 provinsi tidak mudah untuk dipenuhi.

Meski pemerintah mengusulkan jumlah pendiri partai lebih sedikit, faktor keharusan tersebar pada minimal 75 persen diharapkan bisa menjadi upaya menyederhanakan partai.

Syarat lain yang diminta pemerintah terkait dengan pasal 3 ayat 2 e. Pemerintah meminta nominal rekening partai politik diubah dari Rp 100 juta menjadi Rp 1 miliar. Nilai Rp 1 miliar dipilih sebab bila dibagi 33 provinsi, setiap provinsi

dihitung memiliki dana sebesar Rp 30 juta.

"Rasanya Rp 1 miliar tidak berat untuk partai berukuran nasional," katanya. Nilai Rp 100 juta, seperti tertera dalam UU No 2 Tahun 2008, dirasa perlu direvisi sebab tidak menunjukkan kekuatan partai politik.

Masih ada tiga usulan lain dari pemerintah, yakni terkait dana pendidikan politik, pertanggungjawaban keuangan partai yang terukur per tiga bulan atau enam bulan setelah pemilu, serta lambang partai.

Wakil Ketua Komisi II dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengatakan, usulan pemerintah sebenarnya sejalan dengan semangat partai dalam parlemen. "Relatif semangatnya sama, dalam dua kali rapat, saya percaya revisi sudah bisa jadi," ujarnya.

Tak heran, kata Ganjar, kalau dalam sidang tadi pemerintah berani menawarkan penyelesaian revisi undang-undang ini pada tahun ini juga. ■ ed: joko sadewo

80 Persen Kabupaten, APBD-nya Dialokasikan untuk Belanja Pegawai

JAKARTA — Sekitar 50 orang bupati se-Indonesia, Kamis (25/11), melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR. Mereka mengeluhkan tentang minimnya Anggaran Belanja Daerah (APBD) untuk alokasi pembangunan.

Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi II Chairuman Harahap itu, Wakil Ketua Umum Apkasi yang juga Bupati Kuningan, Aang Hamid Suganda, mengatakan, lebih dari 80 persen kabupaten di Indonesia belanja pegawainya lebih besar ketimbang belanja untuk pembangunan atau sektor publik. Padahal, ini menjadi salah satu ciri pemerintahan yang tidak baik.

"Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan gaji pegawai tidak diiringi dengan penambahan dana alokasi umum bagi daerah dan karenanya kami mengharapkan DPR ikut memperha-

tikan pertimbangan kenaikan gaji dengan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah," kata Aang.

Sementara itu, juru bicara Apkasi yang juga Bupati Tanah Datar, Shadiq Pasadigo, mengatakan, ada sejumlah kendala yang mereka hadapi dalam hal birokrasi dan pelayanan publik. Persoalan itu, di antaranya berkaitan dengan masalah manajemen kepegawaian, tidak adanya peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang mengatur standarisasi pendapatan tambahan bagi PNS, batas usia pensiun PNS, pelaksanaan remunerasi PNS, serta membengkaknya anggaran pensiun.

Para bupati menyatakan, baik buruk penyelenggaraan pemerintah di daerah sangat ditentukan kemampuan dan mutu PNS selaku penyelenggara pemerintahan memberikan pelayanan ke-

pada masyarakat.

"Apkasi memandang bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak akan maksimal tanpa adanya birokrasi yang kuat dan dengan sistem yang efisien serta efektif," kata Shadiq, seperti dikutip Antara.

Para bupati itu juga memandang perlu diperhatikan masalah kualifikasi dan kompetensi tenaga honorer, administrasi, dan penggajian kepegawaian, hingga pembinaan kembali peraturan pemerintah yang mengatur gaji bupati dan wakilnya. Termasuk, masalah dana operasional dan dana taktis.

Isu lain yang turut dibahas dalam pertemuan itu, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur dasar di daerah, pemberdayaan daerah perbatasan dan kecamatan sebagai sentra pelayanan di daerah, serta masalah pertanian dan reformasi agraria. ■ ed: joko sadewo

Fitrah Mansion

at Garden of Benefaction

San Diego Hills Memorial Park mempersembahkan Fitrah Mansion produk terbaru dari Five Pillar Garden, dengan lanskap hamparan rumput yang hijau. Posisinya yang tinggi berbukit dihiasi taman yang indah dan semua unit tepat menghadap ke arah Kiblat. Kata Fitrah ini merujuk pada keadaan manusia pada saat ia pertama kali diciptakan, sehingga melalui zakat fitrah ini manusia dengan ijin Allah akan kembali menjadi Fitrah.

- ✓ Pemakaman permanen hanya 1X bayar
- ✓ Cicilan 12X tanpa bunga
- ✓ Gratis asuransi jiwa*
- ✓ Gratis biaya perawatan
- ✓ Gratis keamanan 24/7

*Syarat & ketentuan berlaku

EXIT KARAWANG BARAT 2, KM 46

SALES OFFICE JAKARTA (021) 574-5501

SITE OFFICE KARAWANG (021) 8911-4080

Kami peduli dengan kedukaan yang menimpa keluarga anda. Hubungi emergency call (24 jam)

www.sandiegohills.co.id

081 7001 7003